

**IMPLEMENTASI PERDA NO 02 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAPANULI UTARA**

(Penelitian pada objek wisata Air Soda Tapanuli Utara)

SKRIPSI

OLEH :

STEVANI E. SINAGA

NPM. 198520066



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : **Implementasi Perda No. 02 tahun 2020 Tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisata Daerah Tapanuli Utara
(Penelitian pada objek wisata Air Soda Tapanuli Utara)**
NAMA : **STEVANI E. SINAGA**
NPM : **198520066**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

DISETUJUI OLEH :
Komisi Pembimbing

Dr. Indra Muda. MAP
Dosen Pembimbing 1

Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.Ipol
Dosen Pembimbing 2

Mengetahui,



Dr. Effiati Juliana Hasibuan. M.,Si
Dekan



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.Ipol
Ketua Prodi Administrasi Publik

Tanggal : **14 Agustus 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana yang merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saja kutip dari hasil karya orang lain telah tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etia penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 22 Desember 2023

Stevani E. Sinaga

198520066



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Stevani E. Sinaga
NPM : 198520066
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : *Implementasi Perda no 02 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepawarisataan Daerah Tapanuli Utara (Penelitian pada objek wisata Air Soda Tapanuli Utara)* beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Hak Cipta.

Demikian penyampaian ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 2023

Yang  dibawah ini

(Stevani E. Sinaga)



ABSTRAK

Implementasi adalah bagian yang sangat penting dalam proses kebijakan, karena proses kebijakan mengarah kepada berbagai macam kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi Perda no 02 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah demi mengembangkan objek wisata di Tapanuli Utara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya fasilitas, sarana-prasarana, buruknya akses jalan menuju lokasi Air Soda, dan begitupun lahan yang sangat minim. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan Perda no 02 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tapanuli utara di Air soda dan untuk mengetahui hambatan dalam implementasi dalam Perda no 02 tahun 2020 pada objek wisata air soda tarutung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dimana fokus penelitian ini didasarkan pada empat indikator atau dimensi implementasi dalam George Edward III yaitu komunikasi, Sumber daya, Sikap pelaksana/Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada Dinas Pariwisata dan pada objek wisata Air Soda Tapanuli Utara ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, ada hambatan dan permasalahan untuk memperluas lahan air soda, dan kurang berperannya pemerintah maupun Dinas Pariwisata dalam mengembangkan air soda baik itu menambah fasilitas sarana dan prasarana, akses jalan menuju air soda, dan lahan yg sangat minim, itulah sebabnya air soda susah berkembang dan susah dikenal masyarakat sekitar bahwasannya air soda destinasi yang unik tetapi kurang terawat. Dan begitupun dengan pemilik air soda yang kekurangan dana dalam mengembangkan air soda tersebut, dibarengi dengan pengunjung yang tidak terlalu banyak, kecuali di hari libur dan weekend. Pengunjung kesana juga banyak yang sudah lansia dikarenakan air soda berkhasiat dan bisa menyembuhkan rematik, gatal-gatal pada kulit dan badan yang pegal.

Kata kunci : Implementasi, Perda no 02 tahun 2020, Air soda

ABSTRACT

Implementation is a very important part of the policy process, because the policy process leads to various kinds of activities that have been set to achieve predetermined goals. Implementation of Regional Regulation no 02 of 2020 concerning the Master Plan for Regional Tourism Development for North Tapanuli Regency is for the purpose of developing tourist attractions in North Tapanuli, The problems in this research are the lack of facilities, infrastructure, poor road access to the Water Soda location, and also very minimal land. The purpose of this study is to find out the policy of Perda no 02 of 2020 concerning the Master Plan for Tourism Development in the North Tapanuli Region in Soda Water and to find out the obstacles to implementation in Perda No 02 of 2020 on the tarutung soda water attraction. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques of observation, interviews, documentation where the focus of this research is based on the four indicators or dimensions of implementation in George Edward III, namely communication, resources, executor's attitude/disposition, and bureaucratic structure. The results of research conducted at the Pariwisata Service and at the North Tapanuli Soda Water attraction show that it has not been fully implemented properly, there are obstacles and problems in expanding soda water land, and the government and the Tourism Office lack a role in developing soda water, both increasing facilities and infrastructure, road access to soda water, and very minimal land, which is why soda water is difficult to develop and difficult for the local community to recognize that soda water is a unique but poorly maintained destination. And the same goes for soda water owners who lack funds to develop the soda water, coupled with not too many visitors, except on holidays and weekends. Visitors there are also many who are elderly because soda water is efficacious and can cure rheumatism, itching of the skin and body aches.

Keywords: Implementation, Perda Taput no 02 of 2020, Soda water

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Stevani Evangelina Sinaga dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 14 september 2001 dari ayah Effendi Sinaga dan Ibu Repinna Rajagukguk. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Tahun 2013 penulis lulus dari SDN 174573 Parlombuan, tahun 2016 penulis lulus dari SMP N 2 Sipoholon Hutaraja Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2019 penulis lulus dari SMK N 1 Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dan pada 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Program Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan penulis pernah aktif mengikuti organisai UKMK (unit kegiatan mahasiswa kristen) 2019/2020. Penulis juga pernah mengikuti program Kampus merdeka yaitu PMM (Pertukaran Mahasiswa Merdeka) di Universitas Diponegoro pada tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Kasih KaruniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERDA TAPUT NO 02 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (PENELITIAN PADA OBJEK WISATA AIR SODA TAPANULI UTARA”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, atas doa yang telah diberikan selama ini.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku ketua Program Studi Administrasi Publik dan selaku dosen pembimbing II yang sudah berkenan

untuk meluangkan waktunya demi memberikan dan arahan selama penyusunan skripsi.

4. Bapak Drs. Indra Muda, MAP selaku dosen pembimbing I yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat-sangat bermanfaat selama masa perkuliahan
6. Segenap Tenaga Kependidikan Universitas Medan Area yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis.
7. Kedua orangtua penulis Bapak Effendi Sinaga dan Ibu Repinna Rajagukguk yang paling berpengaruh dalam perjalanan penulis selama kuliah serta dukungan moril dan materil. Yang sudah sangat berperan didalam lika-liku dan perjalanan kuliah saya sampai dalam proses pengerjaan skripsi ini.
8. Ketiga saudara penulis Ivan Sinaga, Elvian Sinaga, Sriniva Sinaga yang senantiasa memberi bantuan dan dukungan kepada penulis.
9. Seluruh teman stambuk 2019 kelas A1 prodi Administrasi Publik, yang telah berjuang bersama penulis dan memberi banyak pelajaran serta pengalaman berharga selama di Universitas Medan Area.
10. Bapak Benny Simanjuntak S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara yang sudah memberikan kesempatan untuk menjalankan penelitian dan juga kelancaran penelitian ini.

11. Ibu Mirna Sihite selaku Pemilik Pemandian Air Soda yang sudah memberikan ijin untuk penelitian serta informasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Juni 2023

Stevani E. Sinaga

NPM: 198520066

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Implementasi.....	7
2.2 Kebijakan.....	8
2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	9
2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	11
2.5 Pariwisata.....	14
2.6 Pengembangan Objek Wisata.....	17
2.6.1 Pengembangan.....	17
2.6.2 Objek Wisata.....	19
2.7 Kerangka Berpikir.....	20
2.8 Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	30
3.2.2 Waktu Penelitian.....	30
3.3 Sumber Data.....	31
	xi

3.3.1 Data Primer	31
3.3.2 Data Sekunder.....	31
3.4 Informan Penelitian.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Taput.....	45
4.1.2 Visi-Misi Dinas Kabupaten Tapanuli Utara	49
4.1.3 Sejarah Objek Wisata Air Soda.....	50
4.1.4 Gambaran Umum Objek Wisata Air Soda.....	51
4.3 Hasil Pembahasan.....	52
4.3.1 Faktor Penghambat Implementasi Perda no 02 tahun 2020.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
Buku	71
Karya Ilmiah (Jurnal/Skripsi/Tesis).....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka berpikir	26
Gambar 4.1 .2Struktur Birokrasi Dinas Pariwisata Tapanuli Utara.....	49
Gambar 4 Air Soda Tapanuli Utara.....	51



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah kunjungan Wisatawan Air Soda Tapanuli Utara.....	4
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	27
Tabel 2.2 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini..	32
Tabel 3.1 Waktu penelitian	36
Tabel 3.2 Informan-informan penelitian	38
Tabel 4.1 objek wisata di Tapanuli Utara	50
Tabel 4.3 Jumlah Wisatawan Air Soda.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

1.1 Lampiran Wawancara.....	77
1.2 Lampiran Dokumentasi	80
1.3 Lampiran Surat rekomendasi penelitian dan surat selesai penelitan..	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam kebijakan publik dimana implementasi adalah penerapan dan pelaksanaan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi juga bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan. Dengan demikian implementasi adalah tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal agar sesuatu benar-benar terjadi. Implementasi kebijakan publik adalah proses yang kompleks, melibatkan dimensi organisasi, kepemimpinan, bahkan, manajerial dari pemerintah sebagai pemegang otoritas. Implementasi ini memegang nilai-nilai kepercayaan (*trust*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Kepercayaan menjadi penting untuk membangun penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan publik, sehingga masyarakat mau mendukung pelaksanaan kebijakan publik tersebut.

Umumnya, implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dalam tahap formulasi kebijakan publik, atau antara visi dengan realitas. Hampir selalu terjadi distorsi antara hal-hal yang ingin dicapai dengan hal-hal yang tercapai atau terealisasikan. Banyak faktor yang dapat menimbulkan distorsi tersebut, misalnya sumber dana minimal yang dibutuhkan ternyata tidak tersedia, sementara pelaksanaan kebijakan publik itu tidak bisa ditunda.

Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagaimana ketentuan Perda no 02 tahun 2020 Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata meliputi :

- a. Fasilitas Utama; dan
 - b. Fasilitas Penunjang
- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pelayanan informasi
 - b. Parkir kendaraan
 - c. Sanitasi dan MCK;
 - d. Keamanan
 - e. Tempat ibadah
 - f. Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas
 - g. Aksesibilitas untuk lansia
- (2) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain area untuk Usaha Mikro, kecil dan menengah, Anjungan Tunai Mandiri dan penukaran uang asing.

Sebagaimana dengan isi PERDA no 02 tahun 2020 pasal 31 tentang bagaimana fasilitas umum dan fasilitas penunjang yang harus diterapkan di semua objek wisata yang ada di Tapanuli Utara. Namun wisata air soda belum memiliki fasilitas umum seperti halnya yang dinyatakan dalam isi PERDA no 02 tahun 2020 diantaranya ialah parkir kendaraan yang belum memadai, sanitas dan MCK (mandi, cuci, kakus) merupakan salah satu fasilitas umum yang digunakan

bersama untuk keperluan mandi, mencuci barang sama halnya di pemandian air soda kamar mandi yang bertahun-tahun dan belum ada pembaharuan.

Keamanan yang terdapat di objek wisata ini sudah berjalan dengan baik, tempat ibadah yang tidak terlalu jauh dari objek wisata air soda. Fasilitas penunjang seperti yang tertera di isi Perda tersebut ialah sumber daya manusia yang mengelola UKM (usaha kecil mikro) terdapat beberapa yang menjual souvenir, makanan dan yang lainnya, dikelola dengan pengelola air soda dan semua pengelola air soda masih berhubungan keluarga melainkan anak dan cucu dari pemilik air soda tersebut. Masih banyak kendala yang terdapat di objek wisata ini, khususnya dari poin-poin yang ada di dalam Perda no 02 tahun 2020 pasal 31 tentang fasilitas umum dan fasilitas penunjang.

Kebijakan PERDA diatas merupakan tindakan pemerintahan untuk membangun dan mengembangkan objek wisata yang ada di Tapanuli Utara. Untuk itu implementasi merupakan tahapan yang sangat penting yaitu penerapan dan pelaksanaan. Peraturan Daerah ini sebagai peraturan untuk mengatur tentang kepariwisataan di Kabupaten Tapanuli Utara, meskipun terdapat berbagai bagian sektor pariwisata sebagai kewajiban pemerintah pusat dalam mengelolanya.

Air Soda adalah salah satu tempat wisata pemandian yang bersoda. Mata Air Soda terletak di kaki bukit daerah Tarutung, di Desa Parbubu, Kabupaten Tapanuli Utara. Mata air soda hanya berjarak satu kilometer dari pusat kota Tarutung dan mempunyai daya tarik tinggi dengan suasana dan pemandangannya yang masih asri. Pemandian ini merupakan objek wisata favorit sekaligus wisata andalan yang diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, naik wisatawan

nusantara maupun wisatawan mancanegara di Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahunnya. Objek wisata pemandian Air Soda adalah salah satu asset wisata alam yang hanya ada dua di dunia ini, yakni di Tarutung dan di Venezuela.

Pemandian Air Soda merupakan salah satu ikon wisata yang terletak di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Menurut masyarakat desa Parbubu Air Soda sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Selain keunikan air sodanya, keasrian alamnya, juga merupakan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung karena letak Air Soda tersebut berada di tengah pesawahan. Pemandian Air Soda ini memiliki beberapa khasiat bagi tubuh. Begitu masuk ke kolam dengan kedalaman 1,8 meter ini, badan akan dipenuhi dengan buih-buih soda. Berendam dalam kolam ini dapat menyembuhkan beberapa penyakit seperti pengapuran tulang, rematik, asam urat, gatal-gatal, dan lain-lain.

Pemandian Air Soda ini sarana dan prasarananya sudah cukup memadai. Tapi masih banyak kekurangan fasilitas seperti kurangnya lahan tempat parkir, makanan halal, kamar mandi, dan air bersih, pondok peristirahatan dan kebersihan. Infrastruktur jalanan menuju kesana yang sempit dan jalanan masih banyak yang rusak. Dan transportasi angkutan minim. Agar pemandian Air Soda Parbubu ini menjadi standart objek wisata dan semakin banyak dikunjungi, apalagi pemandian Air Soda ini hanya 1 di Indonesia sebaiknya pengelola bisa mengembangkan objek wisata ini agar wisatawan nyaman untuk berkunjung dan wisatawan juga bisa merasakan hal sebaliknya apabila sarana dan prasarana tidak dirawat dengan baik.

Tabel 1.1**Jumlah kunjungan Wisatawan Air Soda Kabupaten Tapanuli Utara 2019**

Tahun	Wisatawan Asing	Wisatawan Domestik
2014	1500	91647
2015	1665	108117
2016	1703	128110
2017	1870	145675
2018	2169	150931

Sumber: BPS Taput, 2019

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jumlah wisatawan asing pada tahun 2014-2018 adalah 1500,1665,1703,1870,2169 dan pada tahun yang sama jumlah wisatawan domestik sebanyak 91647,108117,128110,145765,150931. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ketahun, baik wisatawan asing maupun domestik. Ini salah satu alasannya mengapa dikatakan wisata yang handal di Tarutung. Hal ini harusnya membuat Tapanuli Utara merasa bangga dengan potensi yang dimiliki dan mampu membuat jadi Wisata andalan.Untuk itulah perlu adanya peran kedua pihak yaitu Pemerintah dan pengelola wisata dalam pengembangan wisata dengan mengetahui atribut pariwisata yang perlu dan tidak perlu ditingkatkan agar pengelolaan objek wisata Pemandian Air Soda Di Tapanuli Utara dapat lebih efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perda Taput no 02 tahun 2020 tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Penelitian pada objek wisata Air Soda Tapanuli Utara)”

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Perda no 02 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Air Soda Tarutung?
2. Apa hambatan implementasi kebijakan Perda no 02 Tahun 2020 pada objek wisata Air Soda Tarutung?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan Perda no 02 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tapanuli Utara di Air Soda Tarutung
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Implementasi dalam Perda no 02 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tapanuli utara pada objek wisata Air Soda Tarutung

1.3 Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis
 - a) Manfaat bagi peneliti diharapkan dapat meningkatkan wawasan peneliti terkait implementasi kebijakan Perda Taput no 02 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
 - b) Manfaat untuk kelembagaan penelitian yaitu diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga wisata Air Soda Tarutung agar lebih berkembang sesuai yang diharapkan.

2. Secara Teoritis

Bagi penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dalam membuat suatu kebijakan yang tepat dalam meningkatkan pariwisata khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementansi

Menurut Mazmanian dan Sebastier Waluyo, (2007;49), bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Patton dan Sawicki, (2003;77) mengemukakan Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Abdul Wahab dalam Dr. Arifin Tahir (2008) Implementasi sudah sepantasnya terkait langsung dengan kebijakan. Implementasi menurut yaitu penerapan kebijakan biasanya berupa undang-undang, perintah atau keputusan dalam mengatasi suatu masalah dan memiliki tujuan/sasaran yang hendak dicapai.

Menurut Nugroho (2003;45). Implementasi adalah tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” Wahab, (2008;65).

Dunn, (2003:132). Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Selanjutnya menurut Mulyadi (2015;12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Naditya dkk (2013:1088) menyatakan, “dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”. Sedangkan menurut Wahyu Mulyadi, (2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Kemudian Gunn dan Hoogwood Tahir, (2014:55); “mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”. Menurut Meter and Horn (Taufik dan Isril, 2013:136) menekankan, “bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”.

Selanjutnya Pressman dan Wildavsky Syahida, (2014:8-9) mengemukakan bahwa: “Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”. Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015:229), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah

kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

2.2 Kebijakan

Kebijakan adalah Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. Lasswell dan Kaplan dalam Suyatna (2009 : 3). Menurut para ahli lain kebijakan adalah Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujud-kan sasaran yang diinginkan. (Fredrickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003 : 12). Mc. Rae dan Wilde dalam Suyatna (2009 : 8) mengemukakan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. (Suyatna (2009 : 8)

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

Friedrich dalam Agustino (2012 : 7) Kebijakan diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Adanya pengelompokan tersebut, maka akan

memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi dari awal proses pembuatan, implementasi sampai pada tahap evaluasi akan memberikan kejelasan dan kemudahan arah kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam penyajian suatu kebijakan baru selain diperlukan tiga tahap tersebut diatas juga dipengaruhi dengan adanya penyeleksian sampai pada dampak (*impact*) dari kebijakan yang akan diambil pemerintah tersebut.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Dalam buku Iskandar, (2017;77) Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Menurut Tachjan menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminisratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Iskandar, (2017;89) mengemukakan Pihak yang terlibat penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan Ripley dan Franklin yaitu unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam pelaksanaan kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Terry dalam buku Iskandar, 2017 bahwa program merupakan

rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan *budget*.

Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2012:22) Implementasi kebijakan memerlukan perangkat yang digunakan unruk mengetahui kesesuaian pelaksanaan suatu program dengan kebijakan publik yang menjadi acuannya menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Sugandi, (2011:23) Proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut, bisa ditarik benang merah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. tersebut adalah :

1) Isi atau *content* kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dari sisi *coment* setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumber daya, baik manusia maupun finansial yang baik.

2) Implementor dan kelompok target. Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (*implementatory*) dan kelompok target

(*target groups*). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (*policy makers*), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan dari pada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.

3) Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut George C Edward III (mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Komunikasi

Suatu kebijakan dapat terlaksana apabila komunikasi dilakukan dengan baik oleh para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian (*transmisi*), kejelasan, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Apabila tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tidak jelas bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran atau pemanfaat maka kebijakan atau program tersebut tidak akan berhasil.

- a. Transmisi, dalam hal ini penyampaian atau penyaluran informasi tidak hanya pada organisasi pelaksana melainkan juga kepada kelompok sasaran atau pemanfaat.
- b. Kejelasan, artinya informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam memaknai informasi yang didapat.
- c. Konsistensi, artinya informasi yang disampaikan harus konsistensi sehingga para pelaksana kebijakan dapat menjalankannya dengan baik.

2. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan sumber dsya memiliki beberapa indikator antara lain :

- a. Sumber daya manusia, dalam implementasi kebijakan harus didukung oleh SDM berkualitas yang memiliki keterampilan, keahlian, dan sikap yang professional dalam menjalankan kebijakan tersebut. Untuk itu SDM yang memadai sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu kebijakan atau program.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan terdapat dua bentuk informasi yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor diharapkan mengetahui bagaimana cara melaksanakan kebijakan setelah mendapatkan perintah untuk bertindak. Kedua, informasi mengenai kepatuhan atau ketaatan dalam terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apakah orang-orang yang terlibat didalamnya menaati peraturan tersebut.

- c. Wewenang, dalam implementasi kebijakan wewenang memiliki beberapa bentuk, diantaranya wewenang mengeluarkan perintah, wewenang dalam menyediakan dan menyalurkan dana dsb. Untuk itu diperlukan kewenangan yang cukup untuk melakukan tugas dan tanggung jawab.
- d. Fasilitas, dalam implementasi kebijakan diperlukan adanya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kebijakan demi tercapainya tujuan dan hasil yang diharapkan.

3. Sikap pelaksana,

Sikap pelaksana atau disposisi berhubungan dengan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan atau program. Sikap pelaksana tidak hanya sekedar mengetahui apa yang akan dilakukan melainkan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Menurut Edward salah satu yang perlu diperhatikan dalam disposisi yaitu melakukan pengaturan birokrasi, dalam hal ini merujuk pada perekrutan atau pengangkatan staf dalam birokrasi atau organisasi yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kapabilitas. Selain itu dalam hal ini juga focus pada pembentukan system pelayanan yang optimal dan penilaian personil dalam bekerja.

4. Struktur birokrasi,

Dalam implmentasi kebijakan struktur mencakup dua hal yaitu :

- a. (*Standart operating procedure*) SOP, dalam hal ini membuat SOP atau aktivitas terencana rutin yang digunakan sebagai pedoman dan akan memungkinkan para pelaksana kebijakan (pegawai) untuk melakukan

kegiatan dan tugasnya setiap hari sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- b. Fragmentasi, melakukan fragmentasi bertujuan untuk menyebarkan tanggung jawab berbagai kegiatan atau program yang akan dilakukan kepada beberapa unit kerja yang disesuaikan dengan bidang masing-masing. Sehingga implementasi kebijakan akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten.

2.5 Pariwisata

Krapt dan Hunziker (dalam Yoeti, 2008), pariwisata adalah keseluruhan dari gejala yang ditimbulkan dalam sebuah perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan orang asing itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara. Orang asing dalam hal ini bukan hanya orang dari luar negeri, tapi juga orang dari luar daerah yang menjadi destinasi wisata.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Sunaryo, (2013;45).Industri pariwisata mempunyai sejumlah karakteristik unggul antara lain sebagai berikut:

- a) sektor pariwisata mempunyai keterkaitan rantai nilai (*multiplier effect*) yang sangat panjang dan mampu mendorong pertumbuhan berbagai sector usaha mikro,
- b) sektor kepariwisataan menyerap banyak sumberdaya setempat, dan
- c) industri pariwisata tidak mengenal *over supply* karena mempunyai karakteristik produk yang khas dan terbukti tidak terpengaruh dengan krisis

Yoeti (2008;80) mengatakan daya tarik atau atraksi wisata adalah segala sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti: atraksi alam (*landscape*, pemandangan laut, pantai, iklim dan fitur geografis lain dari tujuan), daya tarik budaya (sejarah dan cerita rakyat, agama, seni dan acara khusus, festival), atraksi sosial (cara hidup, populasi penduduk, bahasa, peluang untuk pertemuan sosial), dan daya tarik bangunan (bangunan, arsitektur bersejarah dan modern, monumen taman, kebun, marina). Kemudian Yoeti (2008) berpendapat bahwa berhasilnya suatu tempat wisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*).

Daya tarik wisata menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab I pasal 5, juga mengemukakan pengertian dari daya tarik wisata yaitu daya tarik wisata” adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Sementara dalam Bab I, pasal 10, disebutkan kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki

potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Yoeti (2008;33) berpendapat bahwa berhasilnya suatu tempat wisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*).

Yoeti (2008;35) Atraksi adalah elemen-elemen didalam suatu atraksi wisata yang secara luas menentukan pilihan konsumen dan mempengaruhi motivasi calon-calon pembeli diantaranya: atraksi wisata alam (meliputi bentang alam, pantai, iklim dan bentukan geografis lain dari suatu destinasi dan sumber daya alam lainnya), atraksi wisata buatan/binaan manusia (meliputi bangunan dan infrastruktur pariwisata termasuk arsitektur bersejarah dan modern, monument, trotoar jalan, taman dan kebun, pusat konvensi, marina, ski, tempat kepurbakalaan, lapangan golf, toko-toko khusus dan daerah yang bertema), atraksi wisata budaya, (meliputi sejarah dan cerita rakyat (legenda), agama dan seni, teater musik, tari dan pertunjukkan lain, museum dan beberapa dari hal tersebut dapat dikembangkan menjadi even khusus, festival, dan karnaval), atraksi wisata sosial, meliputi pandangan hidup suatu daerah, penduduk asli, bahasa, dan kegiatan-kegiatan pertemuan sosial. Kedua, amenitas/fasilitas: terdapat unsur-unsur didalam suatu atraksi atau berkenaan dengan suatu atraksi yang memungkinkan pengunjung untuk menginap dan dengan kata lain untuk menikmati dan berpartisipasi didalam suatu atraksi wisata.

Akomodasi (hotel, desa wisata, apartment, villa, caravan, hostel, guest house), restoran, transportasi (taksi, bus, penyewaan sepeda dan alat ski diatraksi yang bersalju), aktivitas (sekolah ski, sekolah berlayar dan klub golf), fasilitas-fasilitas lain (pusat-pusat bahasa dan kursus keterampilan), retail outlet (toko, agen perjalanan, souvenir, produsen camping), pelayanan-pelayanan lain (salon kecantikan, pelayanan informasi, penyewaan perlengkapan dan kebijaksanaan pariwisata).

Aksesibilitas: elemen-elemen ini adalah yang mempengaruhi biaya, kelancaran dan kenyamanan terhadap seorang wisatawan yang akan menempuh suatu atraksi, seperti infrastruktur, Jalan, bandara, jalur kereta api, pelabuhan laut, perlengkapan (ukuran, kecepatan, jangkauan dari sarana transportasi umum), faktorfaktor operasional seperti jalur/rute operasi, frekuensi pelayanan, dan harga yang dikenakan, peraturan pemerintah yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan transportasi.

2.6 Pengembangan Objek Wisata

2.6.1 Pengembangan

Paturusi (2001:39) mengungkapkan bahwa pengembangan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisikepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi pemerintah. Selanjutnya Suwantoro (2004:120) pengembangan bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas, seimbang dan bertahap. Sedangkan

Poerwadarminta (2002:474). Lebih menekankan kepada suatu proses atau suatu cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik sempurna dan berguna.

Pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Dengan adanya pembangunan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Dengan kata lain pengembangan pariwisata melalui penyediaan fasilitas infrastruktur, wisatawan dan penduduk setempat akan saling diuntungkan. Pengembangan tersebut hendaknya sangat memperhatikan berbagai aspek, seperti ; aspek budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata. Pada dasarnya pengembangan pariwisata dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan permasalahan Mill, (2000:168) Pengembangan pariwisata secara mendasar memperhatikan beberapa konsep seperti:

- (1) Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
- (2) Pembangunan Wilayah Terpadu dan Pengembangan Produk Wisata
- (3) Pembangunan Ekonomi Pariwisata; serta
- (4) Pengembangan Lingkungan.

2.6.2 Objek Wisata

Mappi, (2001:30). Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Seorang wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/Negara karena tertarik oleh sesuatu yang menarik dan menyebabkan

wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/Negara disebut daya tarik dan atraksi wisata. Dalam Undang-Undang No.9 tahun , obyek dan daya tarik wisata adalah segala yang menjadi sarana perjalanan wisata.

Chafid Fandeli (2000: 58) dalam skripsi Nining Yuningsih (2005:18), objek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sedangkan obyek wisata alam adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam dan tata lingkungannya.

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan Kunjungan wisatawan. Kata wisatawan (tourist) merujuk kepada orang. Secara umum wisatawan menjadi subset atau bagian dari traveler atau visitor (I Gde Pitana& I Ketut Surya, 2009:35)

2.7 Kerangka Berpikir

(Sugiyono, 2019) mengemukakan Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting Sudah merupakan aksioma bahwa setiap penelitian yang baik mengharuskan menyusun kerangka pemikiran yang sistematis dan menjelaskan hubungan antara variable bebas dengan variable terkait pada semua variable yang diteliti. Disamping itu, peneliti harus sudah menguasai teori ilmiah yang akan diterapkan pada penelitiannya. Untuk dapat Menyusun

kerangka pemikiran yang baik, peneliti sudah harus membekali pemikiran yang diperoleh melalui penelitisn kepustakaan dan hasil penelitian yang relevan.

Secara garis besar kerangka berpikir dalam penulisan ini berawal dari perkembangan zaman yang menimbulkan berbagai perubahan tatanan kehidupan sehari-hari didalam masyarakat. Peningkatan Kepariwisata dan objek-objek wisata sangatlah berpengaruh penting dalam suatu daerah khususnya di destinasi Wisata Air Soda Tarutung. Dalam menyikapi hal tersebut Pemkab Taput membentuk kebijakan terkait kepariwisataan yang ada di Tapanuli Utara khususnya di Air Soda Tarutung yang tercantum dalam Perda 02 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Titik akhir yang paling penting dari pembentukan kebijakan yaitu terletak pada implementasi kebijakam tersebut. Yang artinya setiap kebijakan yang telah diformulasikan dan dirumuskan tidak akan berguna apabila implementasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Air Soda Tarutung menjadi lokus peneliti untuk mengetahui sejauh mana implementasi sebuah kebijakan dan apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan. Penulis mengkaji melalui evaluasi implementasi kebijakan dengan pendekatan teori dari George C. Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi olem empat variable, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variable tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi

Edward III (dalam Winarno, 2012: 178) Merujuk bahwa setiap kebijakan berhungan dengan komunikasi, maka perlu adanya komunikasi efektif antara

pelaksana program kebijakan dengan kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran harus dikomunikasikan dengan baik, sehingga menghindari distorsi atas kebijakan dan program. Edward secara umum membahas tiga hal penting yang dapat digunakan dalam proses komunikasi. mengemukakan tiga hal tersebut yakni:

a. Transmisi Faktor pertama yang berpengaruh pada komunikasi adalah transmisi. Sebelum pejabat mengimplementasikan suatu keputusan, maka dia harus sadar suatu keputusan tersebut telah dibuat, dan suatu perintah untuk melaksanakannya sudah keluar, kemudian pejabat tersebut harus memahaminya. Hal ini tidak selalu nampak sebagaimana proses yang langsung. Sering kali suatu keputusan itu tidak dilaksanakan dan seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap suatu keputusan yang telah dikeluarkan.

b. Kejelasan Faktor kedua yang ditemukan Edward adalah kejelasan. Mengimplementasikan suatu kebijakan tidak hanya dengan petunjuk yang telah keluar, kemudian diterima oleh pelaksana kebijakan. Akan tetapi, komunikasi yang berisi petunjuk dari suatu kebijakan haruslah jelas.

c. Konsistensi Faktor ketiga yang berpengaruh pada komunikasi adalah konsistensi. Jika ingin suatu kebijakan diimplementasikan dengan efektif, maka harus ada konsistensi perintah. Jika suatu perintah itu jelas tetapi saling bertentangan, maka pelaksana kebijakan akan susah untuk mengimplementasikannya. Pada sisi lain, perintah pada implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong pelaksana untuk bersikap longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan suatu kebijakan.

2) Sumber Daya

Menurut Edward (2012:192), sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari staf yang mempunyai keterampilan yang memadai serta dengan jumlah yang cukup, kewenangan, informasi, dan fasilitas.

a. Staff Ada satu hal yang perlu diingat bahwa jumlah staf atau pegawai tidak selalu mempunyai pengaruh positif dalam implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan kecakapan yang dimiliki oleh staff. Staff harus memiliki suatu keterampilan yang baik dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

b. Informasi memiliki 2 bentuk. Bentuk pertama adalah informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Implementor harus tahu apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian para implementor harus diberi petunjuk untuk melaksanakan suatu kebijakan. Bentuk kedua adalah data tentang ketaatan para personil lain terhadap peraturan pemerintah. Para pelaksana harus tahu apakah orang lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan menaati undang – undang ataukah tidak.

c. Wewenang memiliki banyak bentuk yang berbeda dari suatu program ke program lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Seperti misalnya adalah hak untuk mengeluarkan panggilan untuk datang ke pengadilan; mengajukan masalah – masalah di pengadilan; menarik dana dari suatu program; menyediakan dana, staf, dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah; membeli barang – barang dan jasa; atau memungut pajak. Bisa saja suatu badan memiliki wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang dalam implementasi suatu kebijakan. Bila wewenang formal tidak ada, maka dapat disebut wewenang di atas kertas. Hal ini yang salah dimengerti sebagai wewenang yang efektif. Wewenang

diasas kertas atau wewenang formal adalah suatu hal, sedangkan apakah wewenang tersebut bisa digunakan secara efektif adalah hal lain. Dengan demikian, bisa saja terjadi suatu badan mempunyai wewenang formal yang besar namun tidak efektif dalam menggunakan wewenang tersebut.

d. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas yang memadai, maka dapat mendorong ketidakefisienan.

3) Sikap Pelaksana/Disposisi

Merujuk bahwa setiap kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program. Karakter yang harus dimiliki adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Disposisi memiliki 2 aspek. Aspek pertama adalah tingkat komitmen dan kejujuran implementor dalam implementasi suatu kebijakan. Aspek kedua adalah tingkat demokratis, yang merupakan intensitas pelaksana melakukan sharing, mencari solusi masalah yang dihadapi dan yang kiranya dapat terjadi, serta melakukan direksi yang berbeda dengan guideline guna mencapai tujuan dan sasaran program atau kegiatan. Disposisi juga bisa menghambat implementasi. Pengaruh buruk disposisi ini, dapat terjadi apabila kebijakan yang masuk ke zona ketidakacuhan, karena bertentangan dengan pandangan 20 pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para implementor.

4) Struktur Birokrasi

Merujuk bahwa hal ini mencakup dua hal penting, pertama adalah tentang SOP, dan tentang fragmentasi. Mekanisme dari suatu tugas - tugas dalam organisasi publik atau swasta biasanya ditetapkan melalui *Standart Operating Procedure* (SOP). SOP pada sisi keunggulan dapat dijadikan usaha menanggulangi keadaan umum yang ada diberbagai sektor publik dan swasta, dan bagi implementor dapat digunakan dalam menyeragamkan tindakan - tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP pada sisi kelemahan yakni apabila suatu kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim, tetapi SOP yang ada bertentangan atau belum ada SOP.

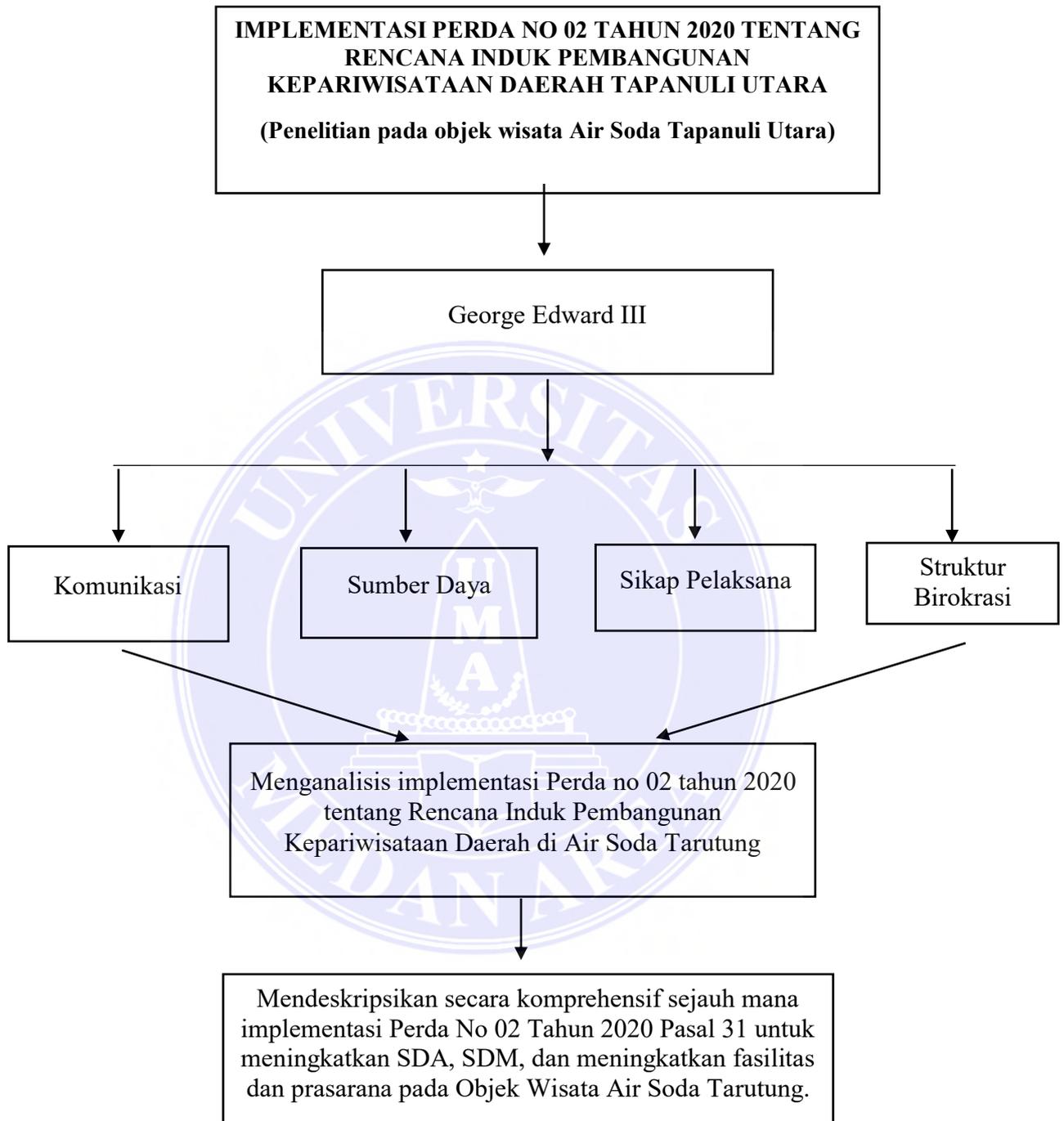
Fragmentasi organisasi berhubungan dengan badan yang bertanggung jawab, kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh, dan sifat multi dimensi dari banyak kebijakan. Konsekuensi dari fragmentasi birokrasi apabila birokrasi tersebut besar adalah menghambat koordinasi, yang dapat menyebabkan hal yang berbelit, panjang, dan kompleks. Struktur birokrasi berperan penting dalam implementasi. Struktur birokrasi mempengaruhi struktur birokrasi kedalam dan struktur birokrasi keluar. Ketika struktur birokrasi terpecah-pecah maka dapat meningkatkan untuk gagalnya implementasi.

Hal tersebut terjadi karena meningkatnya kegagalan komunikasi, karena banyak yang menerima perintah – perintah. Kemudian semakin besar pula kemungkinan – kemungkinan distorsi karena banyaknya penerima perintah. Fragmentasi dari struktur birokrasi membatasi dengan jelas kemampuan para pejabat tinggi untuk mengkoordinasikan sumber– sumber yang tersedia. Disamping itu, terjadilah pemborosan sumber– sumber, termasuk sumber yang langka, karena ketidakefisienan yang melekat karena fragmentasi dan *Standart*

Operating Procedure (SOP). Fragmentasi juga mempengaruhi kecenderungan dalam beberapa hal. Hal tersebut adalah perilaku parokial, dan terbukanya akses kepentingan swasta yang akan menekan pelaksana agar bertindak atas dasar kecenderungan pribadi. Keempat variabel tersebut saling berpengaruh dan mempengaruhi dalam implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan program/kebijakan yang telah ditetapkan. Jika salah satu variabel terdapat permasalahan, maka dapat mempengaruhi pencapaian tujuan.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti, 2023

2.8 Penelitian Terdahulu

2.1 Tabel penelitian terdahulu

No	Nama Penulis/ Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Erna Rustiana, dkk/ 2019	Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataa n di Kabupaten Garut	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan terhadap fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.	Hasil yang dapat disimpulkan yaitu pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut secara keseluruhan belum optimal dimana masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan sehingga berdampak pada minat kunjungan wisatawan ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Garut.

2	Delly, Faizal Amwar, Novliza Eka Patrisia/ 2019	Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu	Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2011: 36) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu sekelompok manusia, objek, kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Data Primer, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Sekunder, data sekunder merupakan	Hasil yang dapat disimpulkan 1. Sasaran Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu adalah pelaku usaha yang ada di daerah wisata tersebut dan Standar kebijakan yang ada sudah sesuai Perda No. 06 Tahun 2016. Sumber daya yang ada sudah memadai baik sumberdaya manusia maupun sumber daya finansial sehingga Pantai Panjang dapat dikembangkan dengan membangun fasilitas-fasilitas publik seperti: Masjid, tempat pusat kuliner, taman Berkas dan Sarana Kebersihan Pantai. Komunikasi antar Stakeholders sudah sesuai peraturan yang ada namun perlu ditingkatkan koordinasi mengenai tugas antar lembaga. Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu sudah di dukung baik pemerintah maupun sasaran kebijakan tersebut akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang kurang menyadari dalam menjaga daerah pariwisata pantai Panjang tersebut. Sikap pelaksana kebijakan sudah baik dengan adanya motto "Kami Siap Melayani Anda Dengan Prima Dan Transparan". 2. Kendala yang dihadapi kebijakan ini adalah masalah kebersihan dan sudah banyak fasilitas publik yang sudah rusak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran
---	---	---	---	--

			<p>sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen.</p>	<p>masyarakat dalam menjaga fasilitas publik dan koordinasi antar stakeholderterkait, serta belum ada sanksi yang jelas bagi pelanggar kebijakan</p>
3	<p>Juriko Abdussamad, dkk/2022</p>	<p>Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataa n di Desa Botutonuo Kabupaten Bose Bolango.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dengan model triangulasi. Sumber data berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dilokasi penelitian melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara yang memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa diinginkan dalam penelitian.</p>	<p>Dari hasil penelitian ini (1) aspek komunikasi menjadi hal yang sangat krusial untuk dibenahi karena komunikasi dalam pengembangan wisata antara pemerintah Kabupaten dengan masyarakat belum terjalin dengan baik; (2) aspek sumber daya sudah cukup baik dimana untuk kemampuan sudah baik, sementara anggaran dan fasilitas belum memadai; (3) aspek sikap pelaksana sudah baik dimana seluruh stakeholder dan masyarakat memiliki sikap dan komitmen yang tinggi untuk pengembangan wisata; (4) untuk struktur birokrasi sudah baik karena setiap stkakeholder memiliki peran yang sesuai dan pemanfaatan keja sama dengan swasta juga sudah terjalin dengan baik namun untuk tindak lanjut birokrasi dengan penerbitan peraturan daerah secara khusus untuk pengelolaan wisata pantai Botutonuo masih harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.</p>

4	Pakhudin, Arenawati & Titi Sitiawati/ 2022	Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang	Penelitian dilakukan dikawasan wisata Cagar Budaya Banten Lama. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan isu-isu strategis	Dari hasil penelitian ini maka penyimpulan terakhir tentang implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Banten Kota Lama Serang adalah Pengembangan pariwisata dengan Pengembangan pariwisata dengan merevitalisasi dan penataan di Zona penyangga dan pengembangan kawasan wisata Banten Lama yang dilakukan oleh Provinsi Banten yaitu penataan area masjid Banten, Plaza Masjid, Plaza Museum, Taman Benteng Surosowan, Keraton Kaibon, Benteng Spelwijk, Kawasan Masjid pecinan secara fisik sudah banyak mengalami perubahan dan masih proses pembuatan Kanal dan pembangunan Baitul Quran. Sedangkan Pemerintahan Kota Serang fokus pada penataan dan pembangunan Kawasan Penunjang Wisata (KPW) dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti lahan parkir terpadu, pembuatan kios (PKL), toilet, mushola dan Tourism Informasi Centre (TIC) Meski terdapat sejumlah faktor penghambat, terdapat faktor-faktor pendukung yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah Banten Lama, yaitu Komunikasi dan koordinasi, Fasilitas atau dukungan pendanaan, Komitmen para pemimpin politik didaerah, pelibatan banyak organisasi pelaksana.
5	G.A Kristha A.	Implementasi Kebijakan	Penelitian ini merupakan	Dari hasil penelitian ini Implementasi kebijakan

	Indraningsih / 2019	Pembangunan Pariwisata Kota Palu	<p>jenis penelitian kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan terhadap fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu</p>	<p>pengembangan pariwisata daerah dijalankan dengan leading sector Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan organisasi pelaksana lain yang diajak bekerja sama. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Palu merupakan kebijakan yang diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur, konsolidasi budaya, peningkatan kelestarian lingkungan, dan penguatan citra daerah (rebranding).</p>
--	---------------------	----------------------------------	---	--

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

Perbedaan dan Persamaan penelitian sesuai dengan 5 penelitian terdahulu secara umum.

- 1) Pada penelitian pertama terdapat persamaan penelitian terdahulu pertama dengan penelitian saya adalah implementasi kebijakan

pembangunan implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut telah berjalan dengan baik namun masih terdapat sejumlah masalah. Beberapa masalah yang teridentifikasi antara lain aksesibilitas masih kurang mendukung seperti jalan menuju lokasi wisata relatif kecil, sarana dan prasarana pada obyek wisata belum dikelola dengan baik dikarenakan keterbatasan anggaran, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang budaya sadar wisata dan manfaat dari pariwisata.

- 2) Pada penelitian kedua terdapat perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan saya terapkan karena dalam penelitian terdahulu kedua yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan pariwisata kawasan pantai Panjang kota Bengkulu bahwa hasil penelitiannya menjelaskan hasil implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu di Dinas Pariwisata kota Bengkulu. Kerja sama dengan instansi terkait selalu dikomunikasikan oleh Dinas Pariwisata kota Bengkulu dalam pengelolaan Pantai Panjang agar Bengkulu dalam Mewujudkan Program Wonderful Bengkulu 2020. Mengapa terdapat perbedaan karena objek wisata Air Soda sama sekali tidak dipegang oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Taput dan tidak dikelola atau dikomunikasikan di Dinas Pariwisata Sumatera Utara.
- 3) Pada penelitian ketiga terdapat persamaan penelitian terdahulu pertama dengan penelitian saya. Hasil yang dicapai adalah aspek komunikasi yang belum terjalain dengan baik menjadi hal yang

sangat perlu untuk dibenahi dalam pengembangan wisata antara pemerintah Kabupaten dengan masyarakat. Aspek sumber daya sudah cukup baik sementara anggaran dan fasilitas belum memadai. Aspek sikap pelaksana dan struktur birokrasi sudah baik namun untuk tindak lanjut birokrasi dengan penerbitan peraturan daerah secara khusus harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

- 4) Pada penelitian ini juga terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dimana hasil Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang masih belum maksimal karena komunikasi dan koordinasi antar kelembagaan pariwisata Banten Lama belum efektif yaitu mengenai pengelolaan potensi wisata dan pendapatan dari sektor pariwisata, keterbatasan kuantitas dan kompetensi sumber daya dalam pengelolaan pariwisata di siasati dengan mekanisme secara colaboratif antar kelembagaan pariwisata, sikap pelaksana kecenderungan (disposisi) mendukung penuh kebijakan pengembangan pariwisata tetapi melibatkan birokrasi yang kompleks kecenderungan terhadap kebijakan juga otomatis menjadi beragam, rencana pembentukan kelembagaan pengelolaan khusus Banten Lama agar memiliki struktur organisasi tersendiri yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah dan Steakholder sampai sekarang belum terbentuk.

- 5) Penelitian ini juga terdapat persamaan dimana sama sama kendala yang dapat diidentifikasi adalah kurangnya sinergi (komunikasi) antara pemangku kepentingan, kurangnya kompetensi pelaksana kebijakan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Sementara di sisi lain, komitmen tinggi dari para pemimpin politik lokal dan dukungan yang baik terhadap fasilitas sumber daya menjadi faktor pendukung kebijakan tersebut.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Hamidi, (2004:15- 16). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Suatu metode penelitian yang menggambarkan atau mengumpulkan data berupa cerita rinci dari pada responden dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan para responden. Penelitian deskriptif digunakan bertujuan agar peneliti dapat menggambarkan dengan lebih baik sifat-sifat yang diketahui keberadaannya serta relevan dengan variable-variabel yang diteliti.

(Parnasipan Simamora,2020:3) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga peneliti dapat menggambarkan secara akurat mengenai fakta yang berada dilapangan sesuai dengan deskripsi penelitian dan melalui hasil metode pengumpulan data yang berupa wawancara, obserfasi dan dokumentasi kemudian dalam penentuan informan peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dan snow ball sampling dimana nantinya peneliti sudah menentukan siapa informan yang di anggap mampu menyediakan data dan yang berhubungan dengan data dan jika diperlukan lagi maka informan akan ditambah sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk penelitian.

Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti objek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Implementasi Perda No 02 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

Daerah pada Objek Wisata Air Soda Tapanuli Utara. Penelitian ini akan menghasilkan temuan-temuan baru dalam bentuk uraian dan paparan dari hasil penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Objek Wisata Air Soda Tarutung yang beralamat di jl. parbubu I, Kec. Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Air Soda Tarutung akan menjadi tempat peneliti memperoleh data dan informasi terkait tujuan penelitian. Peneliti memilih lokasi ini dengan alasan ingin mengetahui sejauh mana Implementasi kebijakan di Air Soda Tarutung.

3.2.2 Waktu Penelitian

3.1 Tabel waktu penelitian

No	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1	Pengajuan data awal						
2	Pendaftaran seminar proposal						
3	Seminar proposal						
4	Pengajuan surat penelitian						
5	Penelitian						
6	Penulisan hasil penelitian						
7	Bimbingan hasil penelitian						
8	Pendaftaran seminar hasil						
9	Seminar hasil						

10	Bimbingan proposal skripsi						
11	Pendaftaran siding skripsi						
12	Siding skripsi						

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data primer

Bamayi (2017) Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumbernya secara langsung yakni melalui wawancara, pengamatan langsung ke lapangan serta dokumentasi yang dikumpulkan selama observasi.

3.3.2 Data Sekunder

Imamah (2017) Dapat diperoleh dari buku, ataupun dokumen seperti jurnal, skripsi, tesis, disertai oleh penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

3.4 Informan Penelitian

(Sugiyono, 2019) Penelitian Kualitatif dalam menentukan sampel atau informan memiliki dua teknik samping diantaranya *Probability Sampling* dan *Nomprobability Sampling*. Pada *probability sampling* meliputi pertama *simple random sampling*, kedua *proportionate stratified random sampling*, ketiga *disproportionate stratified random sampling* dan terakhir *area sampling*. Sedangkan *Nomprobability sampling* meliputi sampling sistematis, sampling kuota, *sampling incidental*, *purposive sampling*, sampling jenuh, dan terakhir *snowball sampling*,

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan Teknik *Nomprobability* Sampling yaitu Teknik *Purposive* Sampling, dimana pengambilan sampel atau informan melalui pertimbangan tertentu, dalam arti orang yang terpilih sebagai informan dianggap mengerti dan menguasai berbagai informasi yang akan dibutuhkan peneliti selama melakukan penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini akan membutuhkan 3 jenis informan antara lain :

- 1) Informan Kunci yaitu informan yang dianggap mengetahui informasi penting terkait penelitian. Dalam penelitian ini, informan kunci yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara.
- 2) Informan Utama, yaitu informan yang terlibat secara teknis dan berkaitan langsung dengan tempat penelitian. Dalam penelitian ini informan utama yaitu Pemilik Pemandian Air Soda, Tapanuli Utara.
- 3) Informan tambahan, yaitu informan yang ditemukan disekitar tempat penelitian serta dianggap dapat memberikan informasi terkait penelitian. Dalam penelitian ini informan tambahan yaitu pengunjung Pemandian Air Panas, Tapanuli Utara.

3.2 Tabel informan-informan penelitian

No	Nama	Keterangan	Jenis Informan
1	Benny Simanjuntak S.Sos, M.Si	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara	Informan Kunci
2	Minar Sihite	Pemilik Pemandian Air Soda Tapanuli Utara	Informan Utama
3	Restu Lumbantobing	Pengelola Air Soda	Informan Tambahan
4	Raccal Lumbantobing	Pengelola Aor Soda	Informan Tambahan

5	Veryana Sitorus	Kepala bidang Analisis Layanan Umum	Informan Utama
6	Bapak Simanjuntak	Pengunjung Air Soda	Informan tambahan
7	Ibu Leli Sipahutar	Pengunjung Air Soda	Informan Tambahan

Sumber: Diolah peneliti 2023

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Wawancara

Menurut Sofar dan Widiyono (2013:153) wawancara adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam komunikasi langsung yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data (*interviewer*) sebagai pencari informasi yang dijawab secara lisan oleh informan (*interviewee*) secara singkat wawancara didefinisikan sebagai alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan berfokus Pengembangan Objek Wisata Pemandian Air Soda Tapanuli Utara.

2. Observasi

Menurut Sofar dan Widiyono (2013:153) Pengamatan adalah kegiatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek penelitian dengan menggunakan seluruh indra. Dalam kegiatan ini, dilakukan pencatatan yang sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak atau yang dirasakan indra mengenai gejala-gejala yang muncul pada obyek penelitian. Dilakukan pencatatan yang

sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak atau yang dirasakan indra mengenai gejala-gejala yang muncul pada obyek penelitian.

3. Dokumentasi

Dengan menggunakan dokumentasi maka hasil observasi dan wawancara akan lebih akurat karena dokumentasi didukung dengan berisikan catatan yang sudah berlalu, bisa berupa foto, tulisan, gambar, karya dan sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan Menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, pengamatan di lapangan, dokumentasi dan sebagainya dengan menguraikan hal-hal yang penting sehingga dapat menarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan selama periode penelitian yang telah ditentukan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini akan menggunakan Teknik analisis data antara lain:

1). Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang

memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Menurut Sugiyono (2018:247-249).

2). Penyajian Data

Sugiyono, (2018:249).Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami

3). Penarik Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018:252-253) Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam meningkatkan Implementasi Perda Taput no 02 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Penelitian pada objek wisata Air Soda Tapanuli Utara) dimana hasil dari penelitian dan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara melalui beberapa informan yang sangat mendukung, maka hasil dari observasi penelitian belum sepenuhnya dengan sempurna, ada beberapa faktor hambatan didalamnya.

Faktor penghambat kurang berkembangnya objek wisata Air Soda dimana destinasi ini kurang diperhatikan oleh Pemerintah Taput, Dinas Pariwisata bahkan masyarakat sekitar. Banyak masalah sama sekali belum tuntas dan implementasi pada penelitian ini belum terealisasi dan berjalan dengan baik. Salah satu faktor penghambat dalam objek wisata ini ialah kurangnya lahan untuk lebih mengembang luaskan objek wisata tersebut, baik itu lahan parkir, lahan untuk masyarakat mendirikan usaha/umkm, kamar mandi dan kolam berenang pemandian Air Soda tersebut. Konon pemilik air soda sudah meminta izin kepada pemilik tanah untuk memperluas lahan air soda itu, tetapi pemilik tanah tidak memberi tanah tersebut kepada pemilik air soda didasarkan faktor tanah tersebut sudah lebih dahulu diminta hak milik orang lain dan mungkin sebelumnya ada masalah antara kedua pihak tersebut. Itulah mengapa air soda susah berkembang.

Selain karena kurangnya lahan, faktor penghambat dalam sarana-prasarana juga sangat terbengkalai, dari hasil observasi peneliti dan dari hasil wawancara

tahun ketahun sarana-prasarana, fasilitas utama dan umum bahkan akses jalan ke objek wisata tersebut juga menjadi faktor penghambat yang paling dominan. Air soda adalah objek wisata yang unik hanya dua didunia tetapi kurang terawat dan kurang menarik. Dinas Pariwisata beranggapan bahwa mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai, sedangkan dari beberapa hasil observasi masih banyak yang belum dijalankan dengan baik.

Faktor masalahnya adalah bagaimana pengimplementasian perda no 02 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah air soda tarutung belum terealisasi dengan baik dan berjalan dengan lancar karena isi dari perda tersebut bagaimana fasilitas utama, fasilitas penunjang yang harus dijalankan objek wisata yang ada di Tapanuli Utara, namun hasil observasi yang terdapat di air soda banyak fasilitas yang belum memadai dan masih dinyatakan kurang, bukan hanya dalam fasilitas utama dan fasilitas penunjang saja akses jalan menuju destinasi tersebut juga masih dinyatakan rusak terlihat dari pihak Dinas Pariwisata yang kurangnya komunikasi terhadap pemilik/pengelola air soda tersebut. Pemilik atau pengelola air soda juga sangat membutuhkan bantuan dari Dinas, tetapi karena Air Soda masih berstatus milik pribadi memungkinkan Dinas dan Pemkab Taput sulit mengembangkan objek wisata tersebut.

5.2 Saran

- a. Diharapkan Dinas Pariwisata Tapanuli Utara lebih menerepkan dan memberi perhatian kepada objek wisata air soda Tapanuli Utara, sesuai dengan kebijakan Perda Taput no 02 tahun 2020 pasal 31 tentang sarana-prasarana, fasilitas khusus dan fasilitas umum bahkan akses jalan menuju air soda.

- b. Agar meningkatkan dan lebih mengembangkan objek wisata air soda tersebut, seperti yang sudah diketahui air soda hanya ada 2 di dunia, unik namun tidak terawat. Pemilik air soda juga harus lebih mengembangkan dan memperluas umkm yang ada disekitaran objek wisata tersebut.
- c. Diharapkan Dinas Pariwisata juga lebih berperan aktif dan menjalankan visi-misi terhadap segala destinasi wisata di Tapanuli Utara, menyusun strategi untuk meningkatkan SDA dan SDM yang ada di Taput khususnya di pemandian Air Soda.
- d. Diharapkan pemilik/pengelola air soda semakin memperhatikan daya tarik wisata air soda tersebut, dan memperkenalkan secara luas tentang objek wisata tersebut agar pengunjung semakin ramai dan semakin puas dengan fasilitas, sara-prasarana serta sikap pelaksana yang diterapkan pengelola terhadap pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.V Patton dan D. Sawicki. 1986. Basic method of policy analysis and planning.*
Prentice Hall: Michigan University
- Dr. H. Tachjan, M.Si. 2006. Implementasi Kebijakan Publik.* Aipi Bandung- Pusat KP2W Lemlit Unpad.
- Drs. H Oka A. Yoeti, MBA Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata.*
Universitas Indonesia.
- Dunn, Willia, N. 2003. Pengantar analisis kebijakan publik.* Edisi kedua.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fandeli, Chafid dan Mukhlison. (2000). Pengusahaan Ekowisata.*
Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
- Hogwood dan Gunn (1984) mengidentifikasi proses analisis kebijakan menghentikan kebijakan & model implementasi kebijakan
- Horn. C.V. & Donal Van Meter. (1975). Model-Model Dalam Kebijakan Implementasi. Yogyakarta
- Poerwadarminta W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia,* PN Balai Pustaka Jakarta
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabet.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwantoro. Gamal. 2004. Dasar-dasar Pariwisata,* Penerbit Andi Yogyakarta
- Syaukani, dkk. 2004. Otonomi Dalam Kesatuan.* Yogyakarta : Yogya Pustaka

Karya Ilmiah (Jurnal/Skripsi/Tesis)

- Anggun Rahayu (2019). Pengembangan Objek Wisata Pemandian Air Soda Parbubu dalam Perspektif Komunikasi Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara.* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
- Dumn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta p. 1

- Delly dkk.* (2020) Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Panjang Kota Bengkulu, (Universitas Muhammadiyah Bengkulu) Vol 1 No 1.
- Erina Rusdiana dkk* (2019) Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Garut, Universitas Garut Vol 01, No 01 tahun 2019.
- Filipus & Dody Setiawan.* (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam mewujudkan Kota Pariwisata berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan. Jurnal Sosial dan Ilmu Politik (ISSN, 2442-6962) Vol 6, No. 3 (2017)
- G. A Kistha A. Indraningsih* (2019) Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Palu, SIAH Dharma Sentana Sulawesi Tengah Vol 1 No 1 2019.
- Indra Muda dkk.* (2022) Potensi Wisata Desa Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Universitas Medan Area Vol. 30 No 2 Januari 2022.
- Juriko Abdussamad dkk.* (2022) Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume IX No 2, 2022
- Moleong, Lexy J.* 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mazmanian dan Sebastier* (2012) Implementasi Kebijakan Publik
- Awad, Nadyah dkk.* (2013). Gambaran Faktor Risiko Pasien Diabetes Melitus Tipe II di Poliklinik Endokrin Bagian/SMF FK-UNSRAT RSUD Prof. Dr. R.D Kandou Manado Periode Mei 2011-Oktober 2011. Jurnal e-Biomedik (eBM), Vol.1 (1), Maret 2013: h.45-49.
- Parnasipan Simamora* (2020) Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 6 tahun 2020 tentang Kepariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
- Silaen, Sofar dan Widiyono.* 2013. Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Bogor: In Media.
- Sugiyono* (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabet
- Suyatna, Agus* (2009). Hubungan Hasil Belajar Dengan Sikap Dan Aktivitas Siswa Pada Pembelajaran Dengan Pendekatan Inkuiri. (Online)

(<http://pustakailmiah.Unila.ac.id/2009/07/16/hubungan-hasil-belajardengan-sikap-dan-aktivitas-siswa>), diakses tanggal 4 oktober 2010.

Ujung Wahid Muhammad Abdillah (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Garut. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Garut. Vol 01, No 01 Tahun 2019.

Wahab, S. A (2012) Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. PT. Bumi Aksara: Jakarta. p. 5

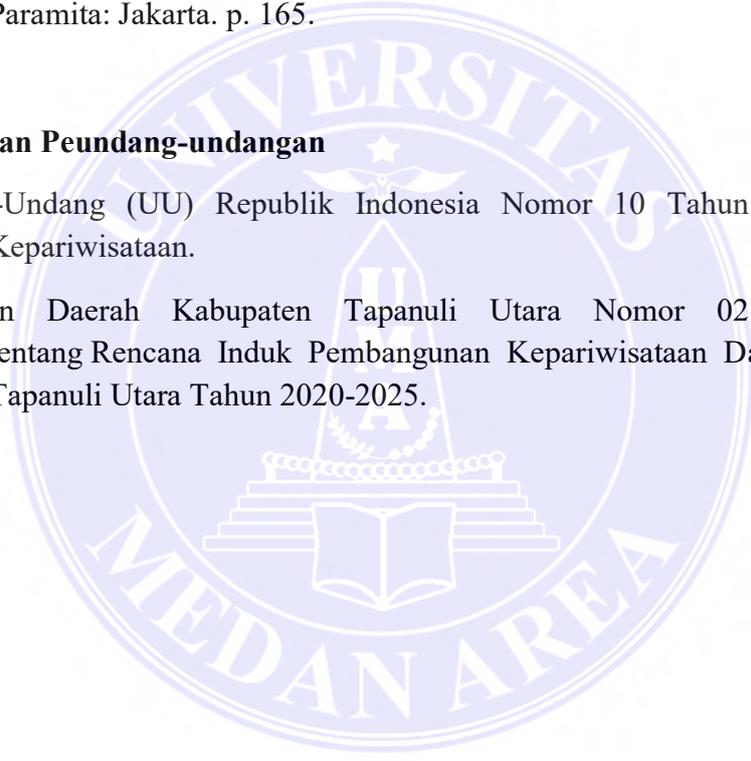
Wahab S. A. 2008, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Yoetti, Oka. A. (2008) Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Pradaya Paramita: Jakarta. p. 165.

Peraturan Peundang-undangan

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2025.



Lampiran

Pedoman Wawancara

IMPLEMENTASI PERDA TAPUT NO 02 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (Penelitian pada objek wisata Air Soda Tapanuli Utara)

Informan I

Nama : Benny Simanjuntak, Veryana Sitorus

Status :Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

Lokasi : Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

Pertanyaan

- a) Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan atau pengelolaan di Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
 - 1) Apakah penyampaian informasi tepat pada kelompok pelaksana dan kelompok sasaran?
 - 2) Apakah informasi tersebut jelas dan mudah dipahami?
- b) Bagaimana sumber daya yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Taput?
 - 1) Apakah sektor pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara sangat berperan dalam mengembangkan objek wisata pemandian Air Soda ini?
 - 2) Bagaimana dengan informasi yang terkait jam operasional dan informasi yang ada di Dinas Pariwisata Taput?
 - 3) Pemandian Air Soda ini hanya satu di Indonesia dan pasti banyak wisatawan yang berkunjung. Tapi mengapa transportasi masih susah di dapatkan dan jalan menuju kesana masih sempit dan banyak rusak?
- c) Bagaimana sikap pelaksana di Dinas Pariwisata Kabupaten Taput?
 - 1) Apakah setiap staff dan pegawai memiliki kemampuan untuk tugas dan tanggung jawab di setiap bidang masing-masing?
 - 2) Bagaimana potensi wisata di Pemandian Air Soda Parbubu dan apa kelebihanannya dengan tempat wisata lain ?
- d) Bagaimana Struktur birokrasi di Dinas Pariwisata kabupaten Taput
 - 1) Apakah Dinas Pariwisata Kabupaten Taput memberlakukan *Standart Operating Procedure* sesuai dengan kegiatan yang berlangsung?
 - 2) Bagaimana dengan penyebaran tanggung jawab di dalam organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Taput tersebut?

- e) Apa saja faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan di Dinas Pariwisata Kabupaten Taput?

Informan II

Nama : Minar Sihite, Pasti Lumbantobing, Raccal Lumbantobing

Status : Pengelola Pemandian (Air Soda Tapanuli Utara)

Lokasi : Air Soda Tapanuli Utara

- a) Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan atau pengelolaan di Air Soda Tapanuli Utara
- 1) Bagaimana pengelola mengembangkan objek wisata Pemandian Air Soda ini?
 - 2) Setiap hari libur pengunjung membludak datang ke Air soda, apakah ada keinginan ibu selaku pengelola untuk membesarkan objek wisata ini , apa harapan ibu ?
- b) Bagaimana sumber daya yang ada di Pemandian Air Soda Tapanuli Utara
- 1) Apa saja Fasilitas umum dan fasilitas utama yang belum memadai di objek wisata ini?
 - 2) Bagaimana kondisi jalan menuju Pemandian air soda?
- c) Bagaimana sikap pelaksana pengelola di pemandian Air Soda Tapanuli Utara?
- 1) Selama berdirinya wisata ini , apa saja kesulitan yang pernah pengelola alami?
 - 2) Apakah yang perlu ditingkatkan agar objek wisata ini dapat berkembang lebih luas lagi?

Informan III

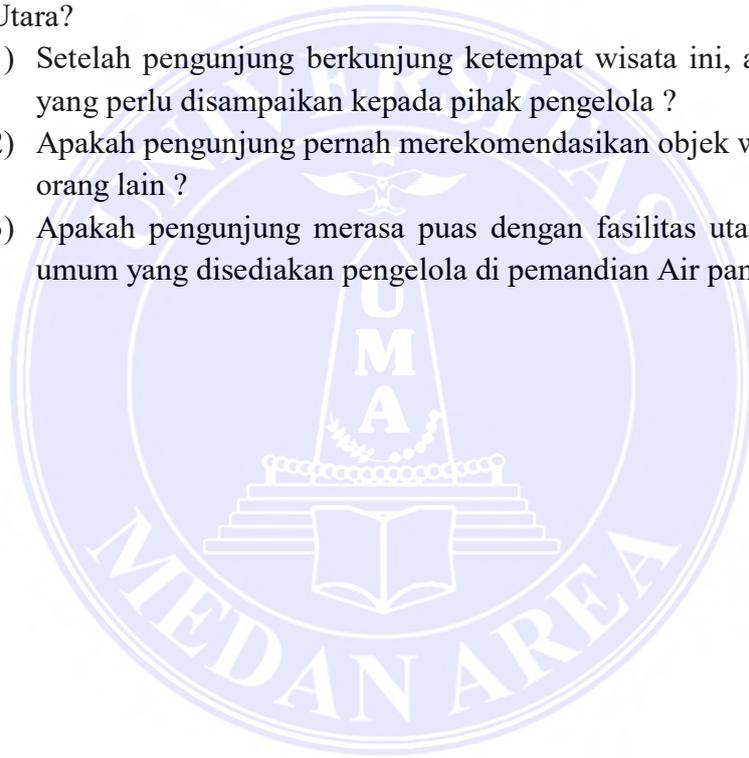
Nama : Bapak Simanjuntak, Ibu Lumbantobing

Status : pengunjung

Lokasi: Pemandian Air Soda

1. Bagaimana komunikasi yang ditemukan tentang objek wisata Air Soda Tapanuli Utara
 - a) Darimana pengunjung mendapatkan informasi tentang objek wisata ini?
 - b) Apakah pengunjung pernah merekomendasikan objek wisata ini kepada orang lain ?

- c) Apakah masukan dan kritikan yang perlu disampaikan pengunjung kepada pihak pengelola?
2. Bagaimana sumber daya yang ada di objek wisata Air Soda Tapanuli Utara?
 - a) Apa saja yang perlu ditingkatkan agar objek wisata ini dapat berkembang lebih luas lagi ?
 - b) Bagaimana pelayanan selama anda berkunjung ke tempat wisata ini?
 - c) Menurut pendapat pengunjung fasilitas yang ada di tempat wisata ini sudah memadai atau belum ?
 - d) Bagaimana pelayanan selama pengunjung berkunjung ke tempat wisata ini ?
3. Bagaimana sikap pelaksana pengelola di pemandian Air Soda Tapanuli Utara?
 - 1) Setelah pengunjung berkunjung ketempat wisata ini, adakah masukan yang perlu disampaikan kepada pihak pengelola ?
 - 2) Apakah pengunjung pernah merekomendasikan objek wisata ini kepada orang lain ?
 - 3) Apakah pengunjung merasa puas dengan fasilitas utama dan fasilitas umum yang disediakan pengelola di pemandian Air panas?



Lampiran Dokumentasi



Foto bersama Sekretaris Dinas Pariwisata Bapak Benny Simanjuntak & Ibu Veryana sitorus selaku staff dibidang Layanan Umum



Sekretaris Dinas Pariwisata memberikan buku panduan tentang Pariwisata yang ada di Tapanuli Utara



Gambar depan Kantor Dinas Pariwisata Tapanuli Utara



Foto bersama dengan Oppung Mirna Sihite, selaku pemilik Air Soda Tapanuli Utara



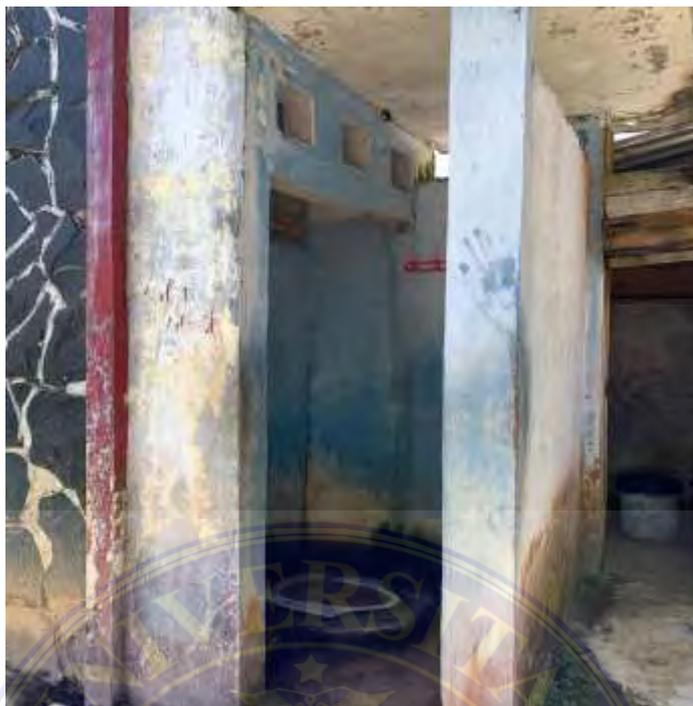
Gambar Air soda Tapanuli Utara



Foto bersama para pengunjung Air Soda Tapanuli Utara



Fasilitas pelampung Air Soda



Gambar kamar mandi Pemandian Air Soda



Lahan Parkir Pemmandian Air Soda

Lampiran Surat

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sebelubud Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 532/FIS.2/01.10/III/2023
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

31 Maret 2023

Yth,
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Stevani E. Sinaga
N P M : 198520066
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara, dengan judul Skripsi "Implementasi Perda No 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tapanuli Utara (Penelitian Pada Objek Wisata Air Soda Tapanuli Utara)"

Pertu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Elhan Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PARIWISATA

Jl. Balige No. 18 Tarutung 22411

Sumatera Utara Telp. (0633) 20448 Fax. (0633) 20448

Website: <http://www.pariwisata.tapanulikutab.go.id>; E-mail: visitt@pariwisata.tapanulikutab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 196 /30.1.1/IV/2023

Tarutung, 04 April 2023

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area
di -
Tempat

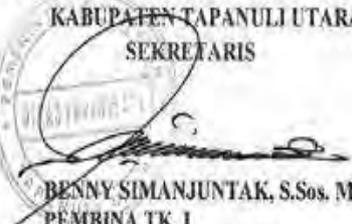
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
Menerangkan bahwa :

Nama : Stevani E. Sinaga
NIM. : 198520066
Program Studi : Administrasi Publik

Adalah benar telah melakukan Pengambilan Data/riset di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten
Tapanuli Utara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Perda No 02 Tahun
2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (Penelitian Pada Objek Wisata
Air Soda Tapanuli Utara)"

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan dengan semestinya

An. KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TAPANULI UTARA
SEKRETARIS


BENNY SIMANJUNTAK, S.Sos. M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19691015 199803 1 007